

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
DALAM KASUS KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
KELAS 1 A**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SARI FATMAWATI

NIM. 10100115081

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Sari Fatmawati
Nim : 10100115081
Tempat/ tgl.Lahir : Lahat Sumatera Selatan, 26 Juli 1996
Jurusan : Hukum Acara Peradilan Agama
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : jln Abu Bakar Lambogo
Judul : Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kasus Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

Dengan ini menyatakan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dengar yang diperoleh karena nya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 24 Juli 2019

Penulis

SARI FATMAWATI

Nim 10100115081

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM KASUS KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA" , yang disusun oleh Sari Fatmawati. NIM: 10100115081 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 5 Agustus 2019 M
04 Zulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Munaqisy I : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.

Munaqisy II : H. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D.

Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Pembimbing II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I.

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM KASUS KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1 A”** ini dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril. Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Munasip dan ibunda Yulma yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibunda dan ayahanda. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya.
2. Seluruh Keluarga besarku dari tante, om, sepupu, kakak-kakakku, dan adik-adikku, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan study dan telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril dan materi serta iming-iming hadiah untuk memotivasi penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di salah satu kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan segenap pegawai Fakultas Syari'ah dan hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teruntuk Bapak Dr. H. Supardin, M. H. I. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, dan Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Sekertaris jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar terimah kasih telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teruntuk Bapak Dr. H. Supardin, M. H. I. selaku pembimbing 1 dan Dra. Hj. Hartini Tahir, M. H. I. selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat dan motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk kepada Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, dan Staf Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A yang telah membantu saya dalam proses penelitian mengenai perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

9. Kawan-kawan seperjuangan mulai dari masuk kuliah sampai selesai. Terkhusus Angkatan 2015 Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar: 1. Istana Squad yaitu Abdul Hakim Hartae, Irvan, Zaenal, Andi Aqo, Soeparmono dkk 2. Terkhusus Kambing Squad yang telah membantu saya untuk terlaksananya sebuah penelitian ini, yang jauh-jauh menemani penulis meneliti di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A yang berada di jalan perintis kemerdekaan kepada: Rustiani Nurfah, Nurul Azizah, Nurmianty Sirajuddin, Khaerunnisa terima kasih banyak teman-teman, serta yang penulis tidak bisa ucapkan satu persatu namanya terimakasih telah menambah cerita dan pengalaman dalam hidup yang akan selalu menjadi kenangan.
10. Saudara-saudaraku, KKN (Kuliah Kerja Nyata). Kebersamaan kita merupakan hal yang terindah dan akan selalu teringat, semoga persahabatan dan perjuangan kita belum sampai disini, serta kekeluargaan yang sudah terjalin dapat terus terjaga, sukses selalu dalam meraih cita-cita dan harapan.
11. Kepada saudara-saudara terdekat saya, yang selalu memberikan motivasi dan semangat yaitu: Rustiani Nurfah, Putri Aina M. Nurmianti sirajuddin, Rahmi Humaidah, Khaerunnisa Mansur, Nurul Azizah M dan masih ada lagi yang belum sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi orang-orang penting dalam hidupku sampai saat ini tetap lah menjadi orang yang membanggakan untuk penulis.
12. Seluruh keluarga, dan rekan yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis, terutama yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah swt., karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 7 Juli 2019

Penulis

SARI FATMAWATI

Nim 10100115081

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	11
A. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan Agama.....	11
B. Definisi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	14
C. Dasar Hukum Kewarisan Menurut Istilah dan Bahasa.....	20
D. Kewenangan, dan Tugas Pokok Peradilan Agama, serta Fungsi Pengadilan Agama.....	22
E. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata.....	27
F. Hukum Kewarisan Islam di Peradilan Agama.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
G. Daftar Pustaka.....	43
BAB IV ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BESERTA PENERAPANNYA PADA KASUS KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1 A.....	44
A. Letak dan Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A...	44
B. Proses/Mekanisme Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kasus Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A....	54
C. Pendapat Hakim dan Panitera Tentang Pelaksanaan Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kasus Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPURAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ى	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَآت *mata*
رَامى *rama*
قِيلَ: *qila*
يَمُوتُ *yamutu*

4. Tā' marbū'ah

Transliterasi untuk tā' marbū'ah ada dua, yaitu: tā' marbū'ah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ *rudal al-at fal*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ *al-madinah al-fadilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا *rabbana*
نَجِّنَا *najjainah*

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الفلسفة *al-falsafah*

البلاد *al-biladu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمرت *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَمُرُونَ *'muruna*

3. Hamzah akhir

يَسْبِيء *'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hurufi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul



B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Sarifatmawati

NIM : 10100115081

Jurusan: Peradilan Agama

Judul : Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kasus Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar kelas 1 A. Pokok Masalah tersebut dibagi menjadi dua Sub Masalah yakni: a.) Bagaimana Mekanisme atau Proses penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A?. b.) Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normative, sosiologi, data diperoleh dari hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan penelusuran berbagai literature atau referensi, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian, dan Pengambilan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a.) Bagaimana Mekanisme atau Proses penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. bahwa pengadilan telah mengeluarkan SK (surat keputusan) yang mengatur tentang biaya panggilan sesuai radius yang harus dibayar oleh masyarakat. b.) Bagaimana Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A adalah: sebagian kecil dapat terlaksana jika kasus kewarisan tersebut melakukan damai di depan Hakim tunggal pada saat mediasi, Sebagian besar tidak dapat terlaksanakan dikarenakan lamanya untuk proses pembuktian objek harta warisan dan melakukan sidang berkali-kali.

Implikasi dari penelitian ini adalah: Sebenarnya dalam perkara ini para pihak juga memiliki peran penting untuk terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. melakukan perdamaian di depan hakim karena perdamaian itu lebih baik dibandingkan harus bersaing karena sebuah harta peninggalan yang membuat persaudaraan semakin menjauh dan karena perkara ini banyak persaudaraan yang terputus karena tertanam nya iri hati akibat sebuah harta peninggalan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah enjujung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hnegara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu mukum dengan tidak ada kecualinya.¹Asas Pengadilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Al-qadhaa' (pengadilan) bertujuan untuk memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi yang bersengketa. Dengan adanya pengadilan, hukum syara' menjadi berwibawa dan dapat terimplementasikan dengan efektif dalam kehidupan sosial.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 86.

Dalam bahasa Arab, *Al-qadhaa'* juga biasa disebut dengan *Al-hukmu* sebab dalam pokok pengadilan terdapat hikmah (yang satu akar dengan *al-hukmu*), dimana dalam proses pengadilan, setiap sesuatu harus ditempatkan pada posisinya yang tepat dan tindakan orang yang zalim harus dihentikan, selain itu, *al-qadhaa'* biasa disebut dengan *al-hukmu* sebab dalam proses pengadilan ada *ihkaamuasy-syai* (memperkokoh dan menyempurnakan sesuatu).²

Dalil pen-Syari'at atau peradilan (*qadhi*) adalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Ijma' dimulai sejak masa sahabat, tabiin sampai para ulama sesudahnya. Hukumnya telah disepakati pula, yaitu *fardhu kifayah*.³

Sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat pertama anatara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Dalam menyelesaikan perkara perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama (PA) berpedoman pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan memiliki peran yang sangat

²Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, Jilid 8, 2011). h. 93.

³Basthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 78.

penting dalam membantu pencari keadilan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.⁴

Sebagai putusan Pengadilan yang menjadi sumber hukum maka perlu memberikan keadilan dalam bentuk putusan yang seadil-adilnya pada pencari keadilan dan menerapkan Asas Sederhan, Cepat, dan Biaya Ringan dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang mengakui pandangan aliran *Sociological Jurisprudence*, terbukti dengan dimasukkannya ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib Menggali, Mengikuti, dan Memahami Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Aspek *Sosiologis* mengandung makna bahwa hakim harus peka dan tenggap terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Aspek *Teleologis* mengandung makna bahwa hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu undang-undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan serta kemanfaatan dalam satu rangkaian sistematis yang sepatutnya tercermin didalam putusan Pengadilan. Sedangkan aspek *Yuridis* mengandung makna dasar putusan hakim harus diletakkan pada undang-undang (hukum tertulis). Keempat aspek yang terkandung dalam Pasal 5 di atas perlu dipahami oleh hakim untuk mencapai cara berpikir paripurna dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hakim dalam tugasnya Menerima, Memeriksa, Menyelesaikan, dan Memutus perkara hendaknya berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi asas tersebut sangat penting untuk diperhatikan sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum

⁴Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integrasi & Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), h. 27

dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dalam memberikan rasa keadilan pada pencari keadilan terutama dalam mencari keadilan dibidang kewarisan bagaimana banyak harta yang dihasilkan dari harta warisan turun temurun yang memiliki peraturan perundang-undangan dari Kitab Hukum Undang-undang Acara Perdata (KHUAPer) baik dari landasan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum Adat, dan yurisprudensi.

Bagitu dari landasan Hukum Waris Islam di Indonesia (HWI) berkembang sangat pesat, ditandai dengan munculnya peraturan dan pendapat dari beberapa ahli, diantaranya:

1. Gagasan tentang harta bersama (gono-gini) dan sistem bilateral dikemukakan oleh Prof. Dr. Hazairin, SH. Beserta ahli hukum lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan dan tata cara pemeriksaan perkara-perkara orang Islam, yaitu: masalah perkawinan, warisan, dan wakaf.
3. Amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur perkawinan, waris, dan wakaf.

Undang-undang dan inpres tersebut merupakan hukum positif di Indonesia. Itu artinya, Hukum Waris Islam (HWI) adalah hukum yang berlaku dan dilaksanakan oleh Negara melalui Peradilan Agama. Hukum Waris Islam (HWI), yang dinyatakan sebagai hukum positif ini, belum diatur dalam undang-undang agar dapat menjadi aturan yang kuat. Banyak hal baru yang dapat ditemukan dalam himpunan peraturan tersebut: diantaranya tentang peradilan ahli waris, gono-gini, perdamaian, dan lain-lain.⁵

⁵Saefudin Afri, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2012), h. 289.

Rumusan pembagian waris menurut Islam, disebut (*fara'id*) jelas dan tepat. Seperdelapan $\frac{1}{8}$ untuk janda, seperenam $\frac{1}{6}$ untuk duda, kakek, ibu, nenek, saudara perempuan, dan kewanitaan perempuan, anak perempuan berhak mendapatkan separo jika tidak ada anak laki-laki, sepertiga bila ada anak laki-laki, dan seterusnya. Semua harta benda waris digabung dan dinilai uang, sehingga pembagian masing-masing dapat dilakukan dengan tepat sekali. Oleh karena ketentuan pembagian waris disebut dalam Al-Qur'an sendiri, maka dianggap sangat mewajibkan. tetapi ketentuan di dalam Al-Qur'an itu tidak mencakup seluruh masalah hukum waris dalam Islam. Dan dilengkapi oleh ketentuan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian kewarisan di Pengadilan Agama banyak yang kurang berjalan dengan lancar untuk proses pembagian harta warisan yang telah diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses hakim menyelesaikan perkara kewarisan yang ingin dieksekusi oleh pihak pemohon apakah penyelesaian dilakukan secara asas yang berlaku di Pengadilan pada umumnya yaitu: "Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan".

Melihat permasalahan tersebut di atas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Eksekusi Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A"**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

- a. Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
- b. Kasus Kewarisan
- c. Pengadilan Agama

2. Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis diangkat, diantaranya:

- a. Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

1) Penerapan

Penerapan yang dimaksud di sini adalah perbuatan menerapkan atau suatu perbuatan mempraktekkan suatu asas, metode, atau pun teori, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu, atau pun suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok, atau golongan yang lainnya.

2) Asas Sederhana

Asas sederhana adalah cara penyelesaian suatu perkara dengan jelas, mudah sedikit, dan sederhana, tidak berbelit-belit.

3) Asas Cepat

Asas cepat adalah cara menyelesaikan perkara dengan tidak memakan waktu yang sangat lama, atau pun mengundur-ngundur waktu ber perkara di Pengadilan.

4) Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan pada saat proses pengajuan sampai putusan perkara di tetapkan, dimana tidak memakan biaya yang begitu banyak pada saat proses berperkara nya dan tidak menyulitkan tergugat, atau pun penggugat, pemohon, atau pun termohon.

b. Kasus Kewarisan

Mengenai Kasus kewarisan di sini menerangkan masalah pembagian harta warisan dan juga penghitungan dalam harta yang ditinggalkan oleh si pewaris namun yang ingin saya terangkan di sini mengenai masalah proses-proses mengajukan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, tatacara pembagian-pembagian harta peninggalan, wasiat, atau pun harta yang dihibakan oleh pewarisnya. Yang menerangkan pula siapa-siapa ahli warisnya baik yang sah atau pun ahli waris yang tidak sahnya, dan masalah harta warisan lainnya.

c. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menerima, memutus, dan memeriksa sengketa yang telah di atur dalam undang-undang khusus tentang ke Islaman bagi kaum muslim.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses atau mekanisme dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas1 A?
2. Bagaimana penerapan kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A di tinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan?

D. Kajian Pustaka

Pertama, Andi Intan Cahyani, S.Ag, M.Ag Dalam bukunya yang berjudul “*Peradilan Dan Hukum Perdata Islam*”: (2014). Dalam buku ini menjelaskan tentang pengertian, tugas pokok, dan dasar hukum Peradilan Agama. Sedangkan pembeda dalam skripsi saya masih kurang lengkap untuk pembahasan tentang pendapat-pendapat para pakar tentang pengadilan, kurang lengkap dalam pengertian tugas pokok Pengadilan Agama dalam hukum perdata Islam, sebagai rujukan dasar hukum Pengadilan Agama dalam Al-Qur’an.

Kedua, DR. H. Amran Suadi, S. H., M.HUM., M.M. Dalam bukunya yang berjudul “*Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*”: (2014) Dalam buku ini menerangkan tentang kedudukan Peradilan Agama di Antara lingkungan Peradilan lainnya. Sedangkan pembeda dalam skripsi saya hanya membahas tentang kedudukan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, belum ada pembeda dengan lingkungan Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketiga, Dr. H. Supardin, M.HI. Dalam bukunya yang berjudul “*Fikih Peradilan Agama Di Indonesia*”: (2017) Dalam buku ini menerangkan tentang sejarah Peradilan Agama dalam buku ini juga selain masalah sejarah Pengadilan Agama ada juga yang menerangkan tentang pemikiran reori sosiologi hukum di mana yang menjadi pembeda di dalam skripsi saya belum ada masalah teori sosiologi hukum nya.

Keempat, Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Yang berjudul “*Hukum Kewarisan Islam*”: (2011). Dalam buku ini menerangkan tentang dasar hukum kewarisan dan juga hak kewarisan. Pembeda dalam skripsi saya adalah belum membahas tentang

hak kewarisan bagi hubungan kekerabatan yang dilihat dari sisi kelahiran akibat hubungan kelamin secara syubhat yang terbagi menjadi dua lagi, dan juga masalah tentang hubungan kerabat atas dasar pembuktian dengan pengakuan.

Selain beberapa buku yang menjadi rujukan penulis juga menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Gatot Teguh Arifyanto. “ *pelaksanaan asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di kabupaten lengkat (implentasi Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*”: (2017). Skripsi ini menuliskan tentang dasar hukum Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hukum Perdata. Pembeda dari skripsi yang saya bahas adalah dia hanya membahas tentang Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hukum Perdata sedangkan saya lebih fokus kewarisan nya secara hukum perdata.

Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah bukan bentuk fokus penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam kewarisan. Dari hal itulah dasar pertimbangan penelitian sebelumnya. Maka dari itu penelitian kali ini akan membahas tentang fokus ke Penerapan Asas Sederhan, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Eksekusi Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Untuk mengetahui apa kah penerapan asas Peradilan ini di terapkan secara sempurna atau masih belum sempurna terutama dalam eksekusi kewarisannya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah proses penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A berjalan dengan sempurna.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi untuk menerapkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A teruta dalam perkara Kewarisan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi Lembaga Keagamaan, Lembaga Peadilan, dan Masyarakat Umum tentang penerpana Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa suatu putusan hakim yang telah ditetapkan masih bisa dieksekusi ditahap banding.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan Agama

Negara Republik Indonesia, sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mengimplementasikan dan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang Sejahtera, Aman, Tentram, damai, dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, maka diperlukan upaya untuk menegakkan Keadilan, Kebenaran, Ketertiban, dan Kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Dengan melihat pentingnya suatu lembaga Peradilan maka Allah swt berfirman: Q.S An-Nisaa/4:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.¹

Untuk mendapatkan keadilan, diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara dalam

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

lingkungan Peradilan di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.²

Terdapat pada Q.S An-Nisaa'/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³

Maksud dari ayat di atas adalah menjelaskan tentang hakim yang memutuskan sesuatu persengketaan di antara manusia harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits apa bila belum di temukan permasalahannya maka hakim berhak melakukan Ijtihad untuk memutuskan perkaranya.

² Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia* (Cet.II; Samata: Alauddin University Press, 2016), h. 3.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Dan telah di jelas kan pula di dalam Haidts Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ (إِذَا دَكَمَ الدَّائِمُ فَأَجْتَهَدُ ثُمَّ أَصْدَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ طَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Terjemahnya:

Dari ‘Amr bin Al-‘Ash, bahwasannya ia dengan Rasulullah S.A.W. bersabda: „Apabila seorang hakim menghukum dengan ijtihadnya, dan setuju dengan kebenaran, maka ia mendapat dua ganjaran; dan apabila ia menghukum dengan ijtihadnya, tetapi ia keliru, maka ia mendapat satu ganjaran”. Muttafaq ‘alaihi.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan pengertian, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu.⁵ Namun dalam revisi pertama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengertian Peradilan Agama berubah kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁶ Revisi Pertama undang-undang tersebut memberikan peluang bagi Peradilan Agama untuk memperluas wilayah absolutnya, karena dalam kalimat “mengenai perkara perdata tertentu” menjadi “ perkara tertentu”, satu kata dihilangkan yakni “perdata”.

Dihilangkan kata “perdata” berarti kewenangan Peradilan Agama dapat diperluas ke perkara pidana, misalnya perkara tentang kekerasan dalam rumah

⁴ Terjemah Bulghul Maram *Kitab Memutus Perkara*, HR. Muttafaq ‘alaihi yang diriwayatkan A. Hassan h. 279.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 2.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 2.

tangga (KDRT). Tiada menutup kemungkinan hal tersebut dapat terwujud, tergantung konstalasi politik, baik dalam wilayah lembaga kekuasaan pemerintahan (lembaga eksekutif) maupun dalam lembaga legislatif dan yudikatif. Peran wakil-wakil rakyat umat Islam yang sangat menentukan termasuk umat Islam yang masuk dalam kabinet pemerintahan.⁷

Untuk dapat meyelenggarakan “Pengadilan yang mampu memberikan pelayanan keadilan yang sebaik-baiknya”, maka di samping mendorong penyempurnaan pelayanan pada ketuju area perubahan, perlu disempurnakan dengan nilai-nilai pengadilan serta kualitas kinerja yang prima. Visi reformasi Peradilan pada Cetak Biru 2003 yaitu: “mewujudkan supremasi Hukum melalui Kekuasaa Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efensien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis dan terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”, Pada Cetak Biru 2010 berubah menjadi “Terwujudnya badan Peradilan Indonesia yang Agung”.⁸

B. Definisi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Makna yang lebih luas dari asas ini, dicantumkan dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2) itu sendiri. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak ada lagi memberi penjelasan yang ada hanyalah sekedar memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁷ Supardin, *Fikih Peradilan Agama* (Cet. II; Samata: Alauddin Unifersity Press, 2016), h. 4.

⁸ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 88.

14 Tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi:

“.....setiap keputusan di mulai dengan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera didapat kepastian hukum. (Pasal 24 dan 50 KUHAP).⁹

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.

1. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁰

Sederhana mengacu pada *complicated* tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan pendapat mereka dengan pasti dan jelas.¹¹

⁹ Asyhadie Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 138.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 36.

¹¹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Alumni, 1992), h. 426

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, Sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan Sederhana formalitas-formalita yang diwajibkan atau diperlukan dalam beraara di pengadilan, makin baik.¹²

2. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan di jatuhkan.

Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk Pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi. Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan ke Panitera, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin di selesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan.

Yang dimaksud dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu 1 (satu) jam atau 2 (dua) jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Jadi yang dituntut oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesah-gesah sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh di buat lampat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, cermat, wajar, rasional dan

¹²Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 27.

objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.

3. Asas Biaya Ringan

Asas Biaya Ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat pencari keadilan. Biaya Ringan dalam hal ini berarti tidak di butuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara *real* untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di Pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jumlah keungan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Menurut Pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah di daftarkan oleh panitera di dala daftar yang di sediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka Pengadilan. Dalam Pasal 121 (4) HIR menentukan “mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitngkan. Jumlah yang di bayar lebih itu akan di perhitungkan kemudian”.

Dalam rangka penertiban biaya perkara Perdata, perkara Perdata Agama, perkara Tata Usaha Negara, dan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan, maka atas

nama ketua Mahkamah Agung, wakil ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial menerbitkan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara, yang isi singkatnya sebagai berikut:

1. Biaya perkara yang harus di bayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh ketua Pengadilan Tingkat 1, ketua Tingkat Banding, dan ketua Mahkamah Agung.
2. Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara diwajibkan melalui bank, kecuali didaerah tersebut tidak ada bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara.
3. Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6(enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPperdata). uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke kas negara.
4. Apabila ada uang yang dititipkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di bank. Apabila uang tersebut menghisilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada negara.¹³

¹³Gatot Teguh Arifyanto, *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, skripsi (Medan; Fakultas Syari'ah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), h.38.

Tujuan pembayaran biaya perkara melalui bank adalah untuk penertiban pembayaran serta transparansi keuangan Pengadilan. Apabila di wilayah Pengadilan tempat Anda berperkara tidak terdapat bank, maka tindakan pegawai Pengadilan yang menerima pembayaran biaya perkara dan menyerahkan kuitansi dapat dibenarkan. Namun, bila ternyata di wilayah tempat kedudukan Pengadilan terdapat bank tetapi pembayaran biaya perkara tetap dilakukan kepada pegawai Pengadilan, maka hal ini menyalahi ketetapan Mahkamah Agung.¹⁴

Mengenai Peradilan secara cuma-cuma atau prodeo diatur dalam Pasal 237 HIR/237 R.Bg dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa, “barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos”.¹⁵

Pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat (Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) atau surat keterangan sisoal lainnya seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Majelis Hakim yang telah di tunjuk oleh ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk menangani perkara tersebut melakukan sidang insidentil. Di dalam sidang tersebut memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi. Majelis hakim membuat putusan sela tentang di kabulkan atau tidaknya permohonan perkara secara prodeo tidak di kabulkan, penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka

¹⁴ Andru joe, *Dasar Hukum Acara Pengadilan Agama*, <http://www.hukumonline.com-Hukum-Acara-Perdata>. (24-01-2019).

¹⁵ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 14.

waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan putusan sela, jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai Negara melalui DIPA Pengadilan Agung/Mahkamah Syar'iyah, maka jumlah biaya berserta rinciannya harus di cantumkan dalam amar putusan.

Conohnya: "Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp..... dibebankan kepada Negara". Pemberian izin untuk beracara secara prodeo ini berlaku kemasing-masing tingkah Peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat Peradilan sekaligus.

C. Dasar Hukum Kewarisan Menurut Istilah dan Bahasa

Al-miirats (الميراث) dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata (رَثَ يَرِثُ إِرْثًا وارitsa, yaritsu, irtsan, miiraatsan maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Negara Indonesia mengakui akan perbedaan bahasa dan beragama, diakui oleh konstitusi yakni Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29. Artinya konstitusi memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya termasuk dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Istilah Hukum Islam yang di maksudkan adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum *amali* berupa interaksi sesama manusia, selain *jinayat* (Pidana Islam).¹⁶

¹⁶ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

Dasar Hukum Fikih Mawaris jelas tersurat dalam Q.S. al-Nisa' / 4: 7, 11, 12, dan 176.

1. Dasar Hukum Waris Islam Berdasarkan Al-Hadits.

Masalah kewarisan juga diatur dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu hadits dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang

Terjemahnya:

“berikan faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.¹⁷

2. Ijtihad Para Ulama

Dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah ditetapkan mengenai pembagian harta warisan, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, misalnya status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal dari pada kakek yang bakal mewaris bersama-sama saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran dihibah oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang hukum waris Mesir mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.¹⁸

3. Kompilasi Hukum Islam

Selain Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad, aturan mengenai hukum kewarisan di Indonesia juga termuat dalam sumber Hukum lain yaitu di dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Buku II yang mengatur tentang Hukum Kewarisan yang termuat dalam Pasal 171-214.

¹⁷ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 17.

¹⁸ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 22.

Sedangkan dasar hukum dari hukum kewarisan Islam adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan 44 Pasal, terdapat dalam buku II Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.¹⁹

Menurut Habiburrahman, meskipun Hukum Kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits yang berlaku universal di bumi manapun di dunia ini. Namun, jika ada beberapa perbedaan paham dikalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan Umat Islam kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut dibolehkan dan dipandang sebagai rahmat.²⁰

Pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²¹

D. Kewenangan, dan Tugas Pokok Peradilan Agama, serta Fungsi Pengadilan Agama.

1. Kewenanga dan tugas pokok Pengadilan Agama

kata “Kekuasaan” di sini sering di sebut juga dengan “Kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competent*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “kekuasaan absolut”, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat

¹⁹ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan*, (Cet. II, Gowa: Alauddin University Press, 2017), h. 3.

²⁰ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranda Media Group, 2011), h. 79.

²¹ Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab I, Pasal 171.

mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.²²

Wewenang (Kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR. Atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam ; (c) Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Islam.²³

Berdasarkan konsideran ini dan sebagaimana diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama telah memiliki Kedudukan, Kekuasaan, dan Hukum Acara dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mengakhiri keberanekaan peraturan, susunan, kewenangan, dan hukum acara Pengadilan lingkungan Peradilan Agama.

Susunan hirarki Peradilan Agama diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal ini menetapkan bahwa secara *institusional*, lingkungan Peradilan Agama terdiri dari 2 (dua) tingkat, yaitu Peradilan Tinggi Agama sebagai Peradilan tingkat banding. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama ialah Pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling

²² Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 25.

²³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita* (Cet. II, Malang: UIN- Malang Press, 2009), h. 194.

bawah dan paling awal. Peradilan Agama bertindak sebagai Peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap pertama segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Kekuasaan atau Kewenangan Peradilan kaitanya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”. *Kekuasaan Relatif* diartikan sebagai kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Peradilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Agama Sidoarjo, dan Pengadilan Agama Jombang.

Mengenai Kekuasaan Absolut, yakni kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, sebagai contoh: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi Kekuasaan Peradilan Umum. Peradilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.²⁴

- **Kewenangan Mengadili Perkara Bidang Kewarisan, Wasiat, dan Hibah**

Diseluruh Indonesia, mungkin tidak ada masalah Hukum yang lebih membingungkan dari pada masalah Waris, masalah yang mudah sekali menimbulkan kekacauan dan perdebadan seru di kalangan para ahli hukum maupun aktivis politik. Banyak sekali bahan bacaan dan karangan yang

²⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita* (Cet. II; Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 197.

diterbitkan sejak permulaan abad ini. Namun masih belum nampak ada kesimpulan yang menyeluruh dan belum pernah pula dicoba membuat undang-undang yang mengatur masalah waris untuk seluruh Indonesia. Hanya dalam Undang-Undang Agraria Tahun 1960, ditemukan beberapa ketentuan yang menyangkut waris, terutama dalam bentuk bahan penelitian dan administrasi.²⁵

Menurut Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Kewenangan Pengadilan Agama di bidang Kewarisan, yang disebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, adalah mengenai (a) penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris; (b) penentuan harta peninggalan; (c) bagian masing-masing ahli waris; dan (d) melaksanakan pembagian harta peninggalan. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personaliti keislaman. Oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.

Jadi, uraian singkat dari ketentuan Pasal tersebut adalah bahwa pokok-pokok Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama terdiri atas:

²⁵ Ahmad Zaini Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), h. 231.

- a. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi penentuan kelompok ahli Waris, siapa yang berhak Mewaris, siapa yang terhalang menjadi ahli waris, dan penentuan hak dan kewajiban ahli waris;
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan, antara lain tentang penentuan tirkah yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya ahli waris;
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad (pendapar Prof. Hazairin dan KHI); dan
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.²⁶

Pengadilan Agama stabat sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dalam perkara-perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama stabat juga bertugas memberikan pelayanan Hukum Islam bagi Instansi pemerintah yang memerlukan fatwa hukum di wilayahnya, termasuk didalamnya pengisbatan terhadap rukyah hilal dalam menentukan hari-hari besar Islam.

2. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama stabat sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, juga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Pengawasan (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)

²⁶Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, h. 212.

Yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Penitera, Sekretaris, dan di daerah Hukumnya;
 - 2) Ayat (2) Selain tugas sebagaimana diatur dalam ayat 1, ketua Pengadilan Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di Pengadilan Agama dan menjaga agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- b. Fungsi Nasehat (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:
- 1) Ayat (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- c. Fungsi Administrasi (Angka 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengelolaan administrasi Pengadilan Agama berfungsi sebagai pengelolaan administrasi Pengadilan yang menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik administrasi bidang perkara maupun administrasi bidang kesekretariatan, misalnya administrasi kepengawaian, keuangan, dan umum.

E. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata asas memiliki beberapa arti, yaitu: dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); hukum dasar. Asas hukum acara dimaksud adalah hukum dasar/pokok dalam hukum acara perdata yang berlaku pada

Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama. Asas Hukum Acara Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

- a. Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48/2009, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7/1989).
- b. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3/2006 jo Undang-Undang RI Nomor 50/2009).
- c. Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48/2009).
 - 1) Hakim hanya memutus menurut hukum. Setiap putusan hakim harus menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang ditetapkan dalam suatu perkara konkrit.
 - 2) Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengenyampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48/2009, Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7/1989).
- e. Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48/2009, Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7/1989).
- f. Peradilan dilakukang menurut hukum dan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang-Uundang RI Nomor 48/2009, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7/1989, Pasal 121 HIR/ 142 R. Bg).

- g. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48/2009).
- h. Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-sekurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai Ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera Sidang (Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009).
- i. Beracara dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (1) HIR/ Pasal 145 ayat (4) RBg, Pasal 89-91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).
- j. Hakim Pasif (Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) RBg).
- k. Persidangan bersifat terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989).
- l. Hakim wajib mengadili perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- m. Putusan harus disertai alasan (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989).
- n. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- o. Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 57 Undang-Undang RI Terhadap setiap putusan/ penetapan diberikan jalan upaya hukum menurut undang-undang (Pasal 23, 26 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 61 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989).

- p. Tiap-tiap pemeriksaan dan pemuatan hakim dalam memeriksa Perkara harus dibuat berita acara (Pasal 186 HIR, Ps 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 11 (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
- q. Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya Perikemanusiaan dan Perikeadilan. Ketentuan ini ditegaskan pada Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009.²⁷

Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989). Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi: “ Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. Hal tersebut pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (3). Kewajiban penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, tidak saja bagi para pihak yang berkepentingan, tetapi juga bagi seluruh aparat Pengadilan. Ketentuan tersebut ditegaskan pada pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi: “ Pengadilan membantu para pencari keadilan an berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”.²⁸

F. Hukum Kewarisan Islam di Peradilan Agama

1. Ketentuan Umum Hukum Kewarisan

Hukum Kewarisan di Indonesia dikenal dengan empat sistem pelaksanaan Kewarisan, yakni Fiqhi Mawaris, Kewarisan Adat, Kewarisan

²⁷ Andi Intan Cahyani, *Peradilan Dan Hukum Keperdataan Islam*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 53.

²⁸ Daeng Hadi Mapuna, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 34.

Hukum Perdata, dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Namun dalam pembahasan ini dititik beratkan pada pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia terkhusus dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II (Kewarisan).

Para alim ulama mengadakan lokakarnya di Jakarta tanggal 2-5 Februari 1988 telah menerima dengan baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI). Buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang kewarisan, buku III tentang perwakafan. Kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut oleh pemerintah dan masyarakat luas yang memerlukan masalah-masalah dibidang tersebut. Karena itu, kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut perlu disebarluaskan. Atas berkat Allah SWT. Presiden Republik Indonesia Soeharto menetapkan sebagai Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada tanggal 10 juni 1991.

Pengertian Hukum Kewarisan menurut KHI: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Pengertian hukum kewarisan menurut KUHPperdata: “hukum waris adalah hukum yang mengatur tetang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya”.

Pengertian hukum kewarisan menurut hukum adat, Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Ter Haar: Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan berwujud dari generasi pada generasi.

Soepomo: Hukum Adat Waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu agkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

Pengertian Hukum Kewarisan Menurut Fiqhi Mawaris: Kewarisan terampil dari bahasa Arab yaitu *Mawaris* (موارث) bentuk jamak dari miraz (ميراث), yang dapat disamakan dengan intiqal (انتقال) artinya perpindahan, yakni pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, baik perpindahan kongkrit maupun abstrak. Harta orang yang telah wafat disebut pusaka (warisan), karena perpindahannya kepada orang lain.²⁹

2. Hubungan Kewarisan

a. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Kewarisan

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih ke pada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur Hukum Islam atau fikih dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam.

Hak *wala'* itu adalah hak mewarisi harta orang yang telah dimerdekakannya itu jika orang tersebut tidak lagi mempunyai kerabat. Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi bila seseorang yang meninggal tidak

²⁹Andi Intan Cahyani, *Peradilan Dan Hukum Keperdataan Islam*, h.158.

mempunyai ahli Waris, maka harta warisannya itu diserahkan ke perbendaharaan umum yang disebut *baitul maal* yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu di warisi oleh umat Islam.

1) Hubungan Kekerabatan

Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seseorang anak yang dilahirkan oleh seseorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya.³⁰

- Kelahiran Akibat Hubungan Kelamin Secara Syubhat

Pertama, disebabkan oleh hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam akad nikah yang sah. Sebagaimana di sebutkan di atas anak yang lahir itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang menikahi ibunya itu. Selanjutnya, berlaku hubungan Kewarisan di antara keduanya.

Kedua, disebabkan oleh hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam akad nikah yang sah. Perbuatan hubungan kelamin dalam bentuk ini dapat dipisahkan menjadi dua hal: Si pelakunya dinyatakan berdosa dan diancam dengan sanksi *had* (yaitu pukul 100 kali bagi yang belum kawin sebelumnya atau rajam bagi yang telah kawin). Perbuatan tersebut dinamai *zina*. Hubungan kelamin seperti itu disebut *zina* bila pelakunya berbuat secara sengaja dan melawan hukum.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Edisi. II; Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2011), h.179.

Si pelaku perbuatan itu tidak dihukum berdosa dan tidak dikenai sanksi *had*; yaitu bila perbuatan itu dilakukan atas suatu kesalahan. Hubungan kelamin dalam bentuk ini disebut hubungan kelamin secara syubhat. (secara leksikal syubhat berarti kesamaran atau ketidak pastian. Dalam istilah fiqhi disebut sesuatu yang di ragukan keadaannya).³¹

- Hubungan Kerabat Atas Dasar Pembuktian Dengan Pengakuan

Yaitu, pengakuan seorang laki-laki bahwa seorang anak adalah anaknya secara sah. Hal ini dapat terjadi bila seorang laki-laki secara yakin mengetahui ia mempunyai anak di suatu tempat, sedangkan ia tidak mengetahui yang mana anaknya itu. Di lain pihak ditempat itu ada seorang anak yang tidak mengetahui yang mana ayahnya. Si laki-laki menyakini anak itu adalah anaknya berdasarkan tanda-tanda yang dikenalnya dan umur keduanya pun pantas untuk hubungan anak-ayah. Atas dasar hal tersebut ia memberikan pengakuan bahwa si anak adalah anaknya sedangkan si anak tidak membantah pengakuan itu.³²

- Anak Angkat

Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau yang dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan mengajukan mengangkat anak orang lain dalam arti pemeliharaan. Dalam hal ini si anak tetap mempunyai hubungan kerabat dengan orang tua asalnya dan tetap berada di luar lingkaran kekerabatan orang tua yang mengangkatnya, dalam segala akibat hukumnya.

- Struktur Kekerabatan

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h.185.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 187.

Secara pasti tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi yang kuat berkenaan dengan struktur kekerabatan menurut hukum Islam. Meskipun demikian ada petunjuk yang akan menuntun kita kepada suatu kesimpulan logis tentang susunan kekerabatan menurut Islam. Ada beberapa hal yang erat berkaitan dengan hubungan kekerabatan yaitu pembatasan perkawinan, hubungan tanggung jawab dan hak kewarisan.

2) Hubungan Perkawinan

Pertama, hubungan suami istri dalam arti istri yang kematian suami mempunyai hubungan kewarisan dengan suaminya yang telah meninggal lebih dahulu, sebaliknya suami yang kematian istri mempunyai hubungan kewarisan dengan istri yang telah lebih dahulu meninggal itu.

Bagian pertama dari ayat 12 surah *an-Nisaa'*/ 4 menyatakan hak kewarisan suami istri.

Kedua, berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i* yang sedang menjalani iddah talak *raj'i* berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.

3) Hubungan Karena Sesama Islam

Yang dimaksud dengan hubungan sesama Islam dalam bahasan ini secara umum adalah untuk kepentingan agama Islam dan Umat Islam yang tidak terdapat padanya hubungan nasab dan tidak pula hubungan perkawinan. Dalam pengertian

khusus hubungan sesama Islam ini adalah saudara seagama yang disebutkan dalam surah Al-Ahzaab ayat 5 yaitu anak angkat yang disebut “*ikhwan fi al-din*”.

4) Hilangnya Hak Kewarisan

a) Halangan Kewarisan

- Pembunuhan
- Berbeda agama

b) Keutamaan dan hijab

- Hijab penuh

Yaitu tertutupnya hak kewarisan seseorang ahli waris secara menyeluruh, dengan arti ia tidak mendapat apa-apa disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris dari pada dirinya.

- Hijab kurang.

Yaitu berkurangnya hak kewarisan seseorang ahli waris secara sebagian, dengan arti ia tidak mendapatkan separoh dari harta yang semestinya ia dapatkan dari pewarisnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskripsi (*field research*) merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya penelitian ini dilakukan lapangan dalam pencarian sumber datanya, penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode Observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Kriyantono menyatakan bahwa “riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya”. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Berbeda dengan kuantitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian ini, penelitian ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, penelitian akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Penelitian tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau

konsep baru apabila hasil penelitiannya pertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian deskripsi adalah metode penelitian yang mempelajari masalah-masalah yang ada di masyarakat yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar. Di jalan Perintis Kemerdekaan No. Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan proses kesempurnaan penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan terutama dalam Perkara Kewarisan Islam di Pengadilan Agama.
2. Pendekatan Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanpa berbelit-belit dan juga cepat mendapatkan putusan nya.
3. Pendekatan sosial/ sosiologis, adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Proses Kewarisan fakta-fakta di lapangan pada Lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kualitatif deskriptif (*field research*) atau penelitian lapangan dengan cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur kewenangan dan tata cara pemeriksaan perkara-perkara orang Islam.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) . yang mengatur tentang Asas Pengadilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.
 - 4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II (Kewarisan).
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library reseach* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadits,

Peraturan Perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, KBBI dan ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan tujuan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagi ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus huku, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamat), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mengamati kinerja beberapa pegawai Pengadilan Agama.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian, wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang “*open ended*” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pegawai Pengadilan Agama.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan berkas Perkara yang telah didaftarkan ke Panitera, dan juga bukti Administrasi Penggugat.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika sedang melakukan wawancara dengan informan.

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Dalam melakukan penelitian lapangan (*field research*), penulis dalam mengumpulkan data yaitu melalui buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

1. Pengolahan data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapat data dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian dianalisa yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian dengan jalan persentase melalui analisis statistik deskriptif.

1. Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Analisa data yang di dapatkan dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif

analisis, yang menguraikan gambaran dari data yang didapatkan dan menghubungkan satu sama lainnya untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil yang didapatkan itu kesimpulan induktif yang cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data dilakukan dua cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka direkam secara pasti dan juga secara sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatnya ketekunan maka penelitian sistematis tentang apa yang diamati, dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data

2. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

BAB IV

ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BESERTA PENERAPANNYA PADA KASUS KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1 A

A. Letak dan Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

a) Letak/ Alamat Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Makassar. Nomor Telepon : (0411) 4794556; Nomor Fax : (0411) 8993744. Website : www.pamakassar.go.id. E-mail : pamakassar@yahoo.co.id.

b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

- **Visi:** “Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.”

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat. Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah

terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
 - 2) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
 - 3) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
- **Misi:** Pertama “Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman."

Kedua “Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1). menjaga agar

pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan."

Ketiga "Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan". Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum."

Keempat "Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum". Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain."

c) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Pengadilan Agama Makassar, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan);
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Menyelenggarakan pelayanan hukum lainnya seperti Posbakum, Sidang Keliling, Pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo).

d) Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas



Gambar : Gedung Lama Pengadilan Agama Makassar

Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah. Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah **Maknun Dg. Manranoka**, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah **K.H. Abd. Haq** dan **Ince Moh. Sholeh**, dan **Ince Moh. Sholeh** adalah Qadhi terakhir, jabatan **Ince Moh. Sholeh** disebut **Acting Qadhi**. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang

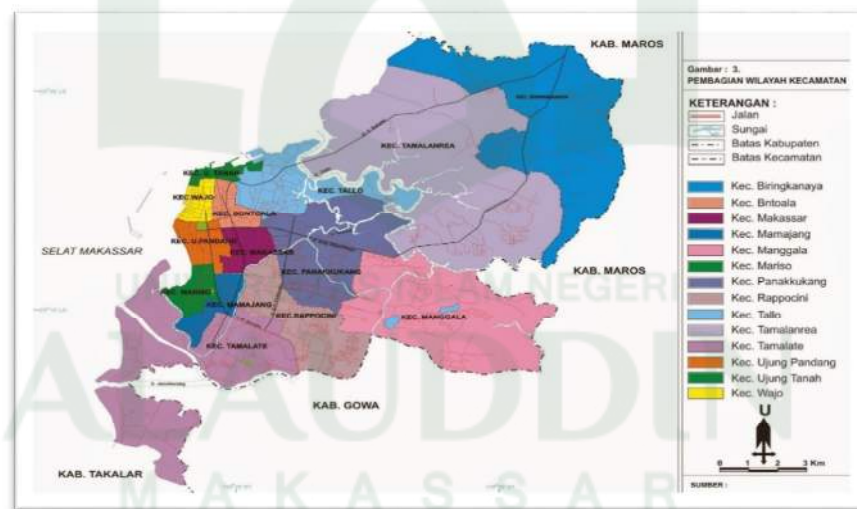
berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar **Daengta Syeh** kemudian gelar itu berganti menjadi **Daengta Kalia**.

Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah”

adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti di uraikan pada penjelasan berikut:

Wilayah Yurisdiksi Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:



- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 16 (Enam Belas) Kecamatan.

Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m² untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M² dan Luas Bangunan 1.887,5 M².

Gambar : Gedung Baru Pengadilan Agama Makassar Klas IA



Keadaan Pegawai dari Masa ke masa

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma. Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara. Berikut ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

No.	Nama Ketua	Periode	Foto
1.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1960 s/d Tahun 1962	
2.	K.H. Syekh Alwi Al Ahdal	Tahun 1962 s/d Tahun 1964	
3.	K.H. Haruna Rasyid	Tahun 1964 s/d Tahun 1976	
4.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1976 s/d Tahun 1986	
5.	Drs. H. Jusmi Hakim, S.H	Tahun 1986 s/d Tahun 1996	
6.	Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1996 s/d Tahun 1998	
7.	Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1998 s/d Tahun 2004	
8.	Drs. H. M. Tahir R, S.H.	Tahun 2004 s/d Tahun 2005	
9.	Drs. Anwar Rahmad, M.H.	Tahun 2005 s/d Tahun 2008	
10.	Drs. Khaeril R, M.H.	Tahun 2008 s/d Tahun 2010	
11.	Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H	Tahun 2010 s/d Tahun 2013	
12.	Drs. H. Usman S,SH	Tahun 2013 s/d Tahun 2014	
13.	Drs. Moh. Yasya', SH.,MH.	Tahun 2014 s/d Tahun 2016	
14.	Drs. H. Damsir, SH.,MH.	Tahun 2016 s/d Tahun 2019	

e) *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A*



B. Proses/ Mekanisme Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Kasus Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

Dalam penelitian tentang penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Kasus Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, penulis melakukan wawancara kepada Hakim dan Panitera di kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut

1. Hakim

Wujud dari penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar bahwa pengadilan telah mengeluarkan SK (surat keputusan) yang mengatur tentang biaya panggilan sesuai radius yang harus dibayar oleh masyarakat, dan surat keputusan ini disamakan dengan pengadilan negeri Makassar supaya tidak ada pemikiran bahwa lebih mahal pengadilan agama dari pengadilan negeri atau sebaliknya. Dan dalam suatu perkara apabila uang panjar yang telah dibayar oleh masyarakat masih ada sisah, maka setelah sidang selesai hakim langsung memerintahkan orang yang berperkara untuk mengambil sisah tersebut di meja kasir, jadi semua pengawai atau aparatur yang ada di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A ini bersih dari hal-hal yang dianggap merugikan masyarakat.¹

2. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar memberikan keterangan melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Panitera. Panitera menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar untuk penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan telah

¹Anwar Sigit, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar, wawancara pribadi, Makassar, 27 Mei 2019.

dilakukan, mulai dari pengajuan perkara, masalah pembayaran, dan surat-surat atau dokumen penting, proses pemanggilan, sampai ditetapkan nya persidangan sampai dengan putusan semua telah dilakukan menurut Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan tapi untuk perkara kewarisan kemungkinan kecil untuk terlaksananya Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan itu pun perkara yang telah melakukan damai di depan Hakim.²

Dari keterangan diatas, telah di terangkan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Makassar telah terlaksanakan dengan baik, di buktikan dengan pelayanan administrasi yang tidak merepotkan para pencari keadilan dan transparansi biaya perkara yang begitu jelas. Kemudian tidak akan mungkin berjalan dengan maksimal pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan apabila hanya pihak Pengadilan Agama saja yang terus berupaya untuk mewujudkannya, pihak berperkara juga memiliki peran dalam rangka menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sendiri. Tetapi terkhusus bagi kasus kewarisan kemungkinan kecil untuk terlaksananya asas peradilan itu sendiri yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dikarenakan kasus kewarisan lah yang sangat berbelit-belit baik dalam bentuk pemeriksaan langsung ke lapangan untuk membuktikan objek (harta) itu sendiri, dan untuk persidangannya biasa dilakukan paling sedikit itu 2 kali sidang.

Perkara yang terlaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu adalah perkara kewarisan yang melakukan damai di depan hakim tunggal pada saat mediasi dilakukan atau pun kasus kewarisan yang perkaranya itu di caput oleh penggugat, dan kasus kewarisan yang salah alamat.

²Hartanto, Penitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Wawancara pribadi, Makassar, 27 Mei 2019.

Adapun untuk kasus kewarisan yang berlanjut maka perkara tersebut susah untuk di laksanakan nya asas sederhana,cepat, dan biaya ringan karena perkara tersebut yang memiliki objek sengketa tanah, sawah dan banyak ahli warisnya ada pun contoh kasus yang sesuai dengan Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kasus Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A seperti ini adalah di nomor perkara “1037/Pdt.G/2019/PA Mks”.

PENETAPAN

Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara waris antara :

PENGGUGAT, umur ± 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kel/desa Bonto Matene , Kecamatan Mandai, Kab. Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salman Farisi, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Jl. Toa Daeng 3 Perum Toa Daeng Country No. 14 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan/desa Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, Ahli Warisnya Penggantinya adalah Zulkarnaen Bin Ramli, umur 30 tahun dan Nurwahidah Bin Ramli, umur 34 tahun, dalam hal ini alamat gaib, sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, Ahli Waris Penggantinya adalah Ispandi Bin Syarifuddin, umur 30 tahun, Abdullah Bin Syarifuddin, umur 23 tahun, dan Herfina Sari Bin Syarifuddin, umur 18 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan/desa Bontorannu Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 16 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap, Tergugat I, II, IV, V dan kuasanya juga datang menghadap, sedang Tergugat III tidak datang menghadap dan menurut relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Makassar, Tergugat III telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan gugatan Penggugat masih perlu diperbaiki dan disempurnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara, maka persetujuan para Tergugat atas permohonan pencabutan tersebut tidak diperlukan, dan oleh karena itu permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1037/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, dan V dan tanpa hadirnya Tergugat III.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. Alimuddin M.	Drs. Syahidal
Hakim Anggota,	Panitera Pengganti,
Dra. Nurhaniah, M.H.	Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan dan PNB	Rp 935.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
7. PNB pencabutan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.041.000,00

TERBILANG : satu juta empat puluh satu ribu rupiah.³

³ Putusan Perkara Nomor: 1037/Pdt.G/2019/PA Mks.

C. Pendapat Hakim dan Panitera Tentang Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kasus Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

a. Hakim

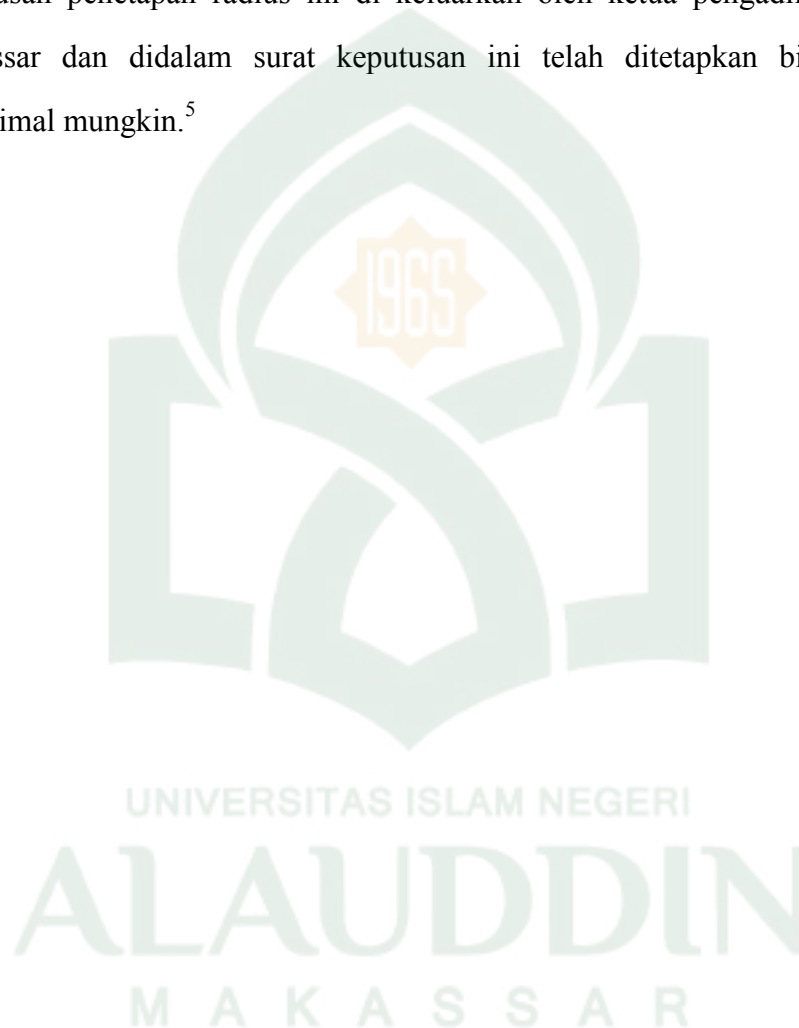
Untuk kasus kewarisan dengan gugatan sederhana tapi itu dibatasi apa bila objek nya di bawah Rp. 200.000.000.00'. Untuk penyelesaian kasus kewarisan sederhana itu di selesaikan oleh hakim tunggal, adapun yang proses kewarisan itu diselesaikan melalui mediasi atau melakukan perdamaian di depan mediator di depan hakim tunggal itu sendiri waktu proses persidangan yang tidak sampai ditahap pembuktian atau pun tinjauan setempat dan lain-lain. Untuk kasus kewarisan yang memiliki objek di atas Rp. 200.000.000.00' dan memiliki banyak objek serta banyak anggota keluarga maka kasus ini tidak bisa di laksanakan secara Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan karena untuk pembuktian objek, proses jawab menjawab, proses bawa saksi, proses pengajuan surat-surat, sampai pembuktian tinjauan setempat itu membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak ringan lagi untuk kasus ini biasa nya melakukan sidang sampai berkali-kali. Sedangkan untuk kasus kewarisan ini biasa nya yang memilki harta warisan Rp. 400.000.000.00' dan memiliki beberapa luas tanah dan lain-lain. Untuk kasus kewarisan yang menerapkan Asas Sederhan, Cepat, dan Biaya Ringan itu hanya terjadi dikasus yang melakukan perdamaian di depan hakim.⁴

b. Panitera

Untuk upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama makassar untuk melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah dilakukan dengan

⁴Anwar Sigit, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Wawancara Pribadi, Makassar, 27 Mei 2019.

semaksimal mungkin. Pelayanan yang sesuai dengan SOP pengadilan agama makassar. Kemudian biaya panjar perkara yang ditetapkan selama ini sesuai dengan radius wilayah masing-masing orang yang berperkara baik wilayah tempat tinggal penggugat maupun wilayah tempat tinggal tergugat. Surat keputusan penetapan radius ini di keluarkan oleh ketua pengadilan agama makassar dan didalam surat keputusan ini telah ditetapkan biaya yang seminimal mungkin.⁵



⁵Hartanto, Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Wawancara Pribadi, Makassar 27 Mei 2019.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai jawaban dari pokok masalah sebagai berikut:

1. Proses/ mekanisme penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, untuk pelaksanaan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bisa terlaksana dengan baik mulai dari prosedurnya tapi untuk kasus kewarisan itu sendiri sangat sulit terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di karenakan waktu untuk pembuktian objek lapangan yang memerlukan waktu sehari-hari, terlaksananya sidang berkali-kali karena proses jawab-menjawab, dan sidang terkadang berlanjut di tahap kedua (banding) karna ketidak puasannya penggugat atas keputusan yang telah di tetapkan oleh Hakim di tahap pertama, dan untuk semua proses tersebut sangat membutuhkan biaya yang banyak juga.
2. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, untuk perkara penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terlaksana dengan baik tapi khusus perdata kewarisan sangat susah terlaksananya penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perkara kewarisan yang terlaksana nya penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

kerena perkara tersebut cacat atau di karenakan perkara tersebut damai saat mediasi ataupun pada saat perkara itu di cabut oleh penggugatnya. Dan untuk kasus kewarisan yang berlanjut sangatlah sulit untuk menerpakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan kerana objek sengketa yang banyak dan juga ahli waris yang banyak pula, butuh waktu untuk masalah pembuktian objek yang di perebutkan dan membutuhkan waktu sehari-hari karena harus turun lapangan langsung untuk pembuktian nya jika harta tersebut berupa tanah, dan untuk proses persidangan yang di lakukan berkali-kali dapat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka kemungkinan kecil terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus kewarisan.

B. Implikasi Penelitian

Setelah penulis mengkaji tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, baik menganalisis proses/mekanisme penerapan nya, dan penerapan asas pengadilan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang mengajukan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, terutama selama proses pengajuan perkara sampai proses persidangan untuk tidak mempersulit jalan nya proses tersebut alangkah baik nya para tergugat untuk saling mengarah kan bagaimana prosedur yang harus di lakukan dan jangan ada yang di tutup-tutupi pada saat pemeriksaan berlangsung agar tidak membuang-buang waktu yang digunakan. Sebenarnya dalam perkara ini para pihak juga memiliki peran penting untuk terlaksananya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Untuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana itu karena keputusan kita sendiri sebagai pihak yang berperkara yaitu melakukan perdamaian di depan hakim karena perdamaian itu lebih baik dibandingkan kita harus bersaing karena sebuah harta peninggalan yang membuat persaudaraan kita semakin menjauh dan karena perkara ini banyak persaudaraan yang terputus karena tertanam nya iri hati akibat sebuah harta peninggalan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Buku-buku

Amrullah, Ahmad, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*.
Jakarta: Gema Insani, 1996.

Anshary. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Cahyani, Andi Intan. *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*. Makassar:
Alauddin University, 2014.

Daniel S.lev, *Mahkamah Agung dan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT.
Intermasa, 1980.

Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Mahkamah Syari'ah di
Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Habiburrahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta:
Pranda Media Group, 2011.

Hartanto, Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Wawancara Pribadi,
Makassar, 27 Mei 2019.

Joe, Andru. "Dasar hukum acara pengadilan agama", *official website of joe,
andru*. <http://www.hukumonline.com/Hukum-acara-peradilan-perdata.html#24januari2019>

- Kusumo, Sudikno Merto. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mapuna, Daeng Hadi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Muhabbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Noeh, Ahmad Zaini. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa, 1986.
- Putusan Perkara Nomor: 1037/Pdt.G/2019/PA.Mks.
- Rasid, A Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Intehrafi & Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2011.
- Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan*. Gowa: Alauddin University Press, 2017.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka, 1992.
- Sulaikin, Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawi Pers, 2014.

Saefudin Afri, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2012.

Sigit Anwar, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Wawancara Pribadi, Makassar, 27 Mei 2019.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN- Malang Press, 2009.

Zaeni, Asyhadie, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.





RIWAYAT HIDUP

Nama : Sari Fatmawati
Nim : 10100115081
Jurusan : Peradilan Agama

Penulis bernama lengkap Sarifatmawati, Lahir di Lahat Sumatera Selatan 26 Juli 1996, Lahir dari pasangan suami istri Bapak Munasip dan Ibu Yulma, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, memiliki seorang adik perempuan bernama Oka Ralita, penulis sekarang bertempat tinggal di Jln. Abu Bakar Lambogo Makassar Sulawesi Selatan.

Pendidikan Formal dimulai dari TK Khadijah 29 Bayuwangi Jawa Timur dan lulus pada tahun 2003. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD.Islam Darul Hikmah Makassar Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di MTS PEST. Mahyajatul Qurra Takalar Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Darussalam Tegalsari Bayuwangi Jawa Timur dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar kejenjang Strata 1 (S1) pada Jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Islam, sampai saat riwayat ini di tulis.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Wawancara Pribadi Mengenai Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Kasus Kewarisan dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Pada Tanggal 27 Mei 2019

Bapak Hakim, Drs. Hj. Anwar Sigit, S H, M H.



Wawancara Pribadi Mengenai Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kasus Kewarisan dengan Ketua Panitera di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Pada Tanggal 27 Mei 2019

Bapak Panitera, Hartanto S H.